



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024 Bupati Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

13. Peraturan



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Anggaran



2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.831.278.208.018
2. Belanja Daerah	Rp. 1.915.509.869.808
Surplus/ (Defisit)	(Rp.84.231.661.790)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 84.231.661.790
b. Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 84.231.661.790
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.831.278.208.018 (Satu trilyun delapan ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan

juta



juta dua ratus delapan ribu delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a sebesar Rp134.540.498.597 (Seratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp49.883.450.000 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.948.370.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp55.708.678.597 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 49.883.450.000 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Pajak



- b. Pajak gubuk pariwisata sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
 - c. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp2.650.000.000 (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak pertandingan olahraga sebesar Rp17.600.000 (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
 - f. Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp13.680.000.000 (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah sebesar Rp724.000.000 (Tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp2.300.000.000 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp6.000.000.000 (Enam milyar rupiah);
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.161.850.000 (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp13.948.370.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp3.880.100.000 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp7.568.270.000 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah

(Dividen)



(Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp55.708.678.597 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
- a. Hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp2.424.200.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp5.100.000.000 (Lima milyar seratus juta rupiah);
 - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara-Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp7.000.000.000 (Tujuh milyar rupiah); dan
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari jasa layanan sebesar Rp41.184.478.597 (Empat puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.672.374.138.551 (Satu trilyun enam ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.600.229.702.444 (Satu triliyun enam ratus milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp72.144.436.107 (Tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah).

Pasal 7



Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.600.229.702.444 (Satu triliyun enam ratus milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan sebesar Rp. 1.301.486.334.444 (Satu trilyun tiga ratus satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - b. Dana desa sebesar Rp. 298.743.368.000 (Dua ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp72.144.436.107 (Tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c sebesar Rp24.363.570.870 (Dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b Rp19.363.570.870 (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9

Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.915.509.869.808 (Satu trilyun

sembilan



sembilan ratus lima belas milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sebesar Rp1.320.869.006.695 (Satu trilyun tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp856.966.805.558 (Delapan ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp397.782.881.137 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0. (Nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0. (Nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp62.219.320.000 (Enam puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.900.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).



Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai dimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp856.966.805.558 (Delapan ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.535.960.805 (Enam ratus delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 51.449.627.504 (Lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp149.941.676.805 (Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp21.798.476.728 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

(6) Belanja



- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.613.693.716 (Satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.080.880.000 (Dua milyar delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp14.400.000.000 (Empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp397.782.881.137 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.395.742.009 (Delapan puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp176.802.583.487 (Seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.396.687.160 (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

(5) Belanja



- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp55.117.157.000 (Lima puluh lima milyar seratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.198.950.000 (Satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp29.365.230.000 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp42.506.531.481 (Empat puluh dua milyar lima ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebesar Rp62.219.320.000 (Enam puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp61.077.320.000 (Enam puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.142.000.000 (Satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp3.900.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 15



Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b sebesar Rp194.907.108.213 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0 (nihil).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp43.097.947.026 (Empat puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp64.944.335.657 (Enam puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp69.246.555.030 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.618.270.500 (Tujuh belas milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 16

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c sebesar Rp6.000.000.000 (Enam milyar rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d sebesar Rp393.733.754.900 (Tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja



- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp391.233.754.900 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp84.231.661.790 (Delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0 (nihil).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan sebesar (Rp.84.231.661.790) (Delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 84.231.661.790 (Delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mandailing Natal ini terdiri dari:



1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Daftar Alokasi Dana Kapitasi per Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

12. Lampiran XII



12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah per Sekolah; dan

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


MUNAWAR, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19810612 201101 1 004





KABUPATEN MANDAILING NATAL

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.540.498.597,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.883.450.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	450.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	250.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	250.000.000,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	200.000.000,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	200.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.650.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.650.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.650.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	17.600.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	17.600.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	17.600.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.680.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.680.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.680.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.300.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.300.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.161.850.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	23.161.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	23.161.850.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.948.370.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.880.100.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.212.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.212.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	605.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	605.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	561.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	561.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	947.100.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	947.100.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.568.270.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.403.270.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	193.270.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.210.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.000.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	6.000.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	55.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.708.678.597,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.424.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	2.424.200.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.424.200.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.100.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.100.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.100.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.000.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.000.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	7.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41.184.478.597,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.184.478.597,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41.184.478.597,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.672.374.138.551,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.600.229.702.444,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.301.486.334.444,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	63.263.016.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.327.913.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.819.987.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	242.735.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.352.346.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	8.473.228.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.936.191.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.110.616.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	870.070.825.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	605.146.922.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	49.008.492.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	106.693.785.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.962.498.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	49.859.128.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.158.378.444,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	380.399.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.880.141.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.883.622.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.718.657.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.475.677.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	15.356.659.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.887.696.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	40.575.527.444,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	239.994.115.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	73.529.600.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	124.912.370.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.679.473.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	20.796.080.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.307.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.839.490.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.530.714.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	399.388.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	298.743.368.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	298.743.368.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	298.743.368.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.144.436.107,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.144.436.107,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.144.436.107,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.340.700.829,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.591.663.560,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.845.442.848,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.076.894.964,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.289.733.906,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.363.570.870,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.000.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	5.000.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	5.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.363.570.870,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.363.570.870,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.363.570.870,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.363.570.870,00
	Jumlah Pendapatan	1.831.278.208.018,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.320.869.006.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	856.966.805.558,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	608.535.960.805,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	447.937.463.184,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	320.432.461.032,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	127.505.002.152,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.830.519.863,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.599.136.863,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.231.383.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.062.355.693,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.062.355.693,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.508.527.896,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.477.351.896,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31.176.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.267.262.932,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.565.006.632,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.702.256.300,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.999.317.717,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.947.238.953,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.052.078.764,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	481.735.636,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	481.735.636,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.636.688,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.854.729,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.781.959,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.315.496.396,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.805.569.739,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.509.926.657,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.005.644.800,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.005.644.800,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.100.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.600.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.500.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.449.627.504,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.881.926.837,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46.881.926.837,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.700.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.700.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.867.700.667,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.867.700.667,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.941.676.805,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.204.718.305,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.187.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	45.375.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	440.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	288.750.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.830.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.250.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	165.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	596.885.805,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	349.035.500,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	33.330.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.125.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.025.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	23.677.500,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.850.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.375.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	35.081.750,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	165.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.375.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.196.250,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	55.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	124.912.370.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	124.912.370.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	20.796.080.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	20.796.080.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.679.473.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.679.473.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.798.476.728,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.529.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.529.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	94.290.840,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	94.290.840,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.693.820.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.693.820.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.551.736,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.551.736,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.750.876,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.750.876,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	77.086.226,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	77.086.226,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.517.400.561,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	82.400.561,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.418.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.770.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.770.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	388.527.189,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	388.527.189,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.613.693.716,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.400.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.620.480,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.620.480,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.142.400,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.142.400,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.662.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.662.600,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	682.182,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	682.182,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.413,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.413,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.664.240,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.664.240,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	340.200,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	340.200,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	425.088,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	425.088,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.143.178.613,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	157.500.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.062.500,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	37.125.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	360.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.000.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	236.250.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.770.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.750.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	135.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	488.361.113,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	285.574.500,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	27.270.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.375.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.475.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	19.372.500,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.150.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.125.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	28.703.250,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.000.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.125.000,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	978.750,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	45.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.080.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	660.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	660.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.420.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.420.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	14.400.000.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	14.400.000.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	14.400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	7.146.490.000,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	5.307.000.000,00
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	5.307.000.000,00
5.1.01.89.03	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	1.839.490.000,00
5.1.01.89.03.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.839.490.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.782.881.137,00
5.1.02.01	Belanja Barang	82.395.742.009,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.693.671.705,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.226.535.182,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	105.005.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.212.567.650,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.429.646.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	584.151.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	472.192.700,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	595.226.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.430.641.190,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.822.341.280,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.347.109.935,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	825.290.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.631.486.140,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.057.456.305,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.486.512.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.150.625.060,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	490.920.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	675.738.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	876.781.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.426.364.983,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	523.576.278,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.875.814.161,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	212.464.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.866.049.900,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	127.571.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.382.837.960,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	58.320.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	469.126.826,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	99.525.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	51.500.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	420.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	29.280.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.864.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	350.382.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	287.869.655,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61.200.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	55.264.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.280.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	51.984.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.646.806.304,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.074.000,00
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	16.245.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	458.891.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	206.378.500,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	11.296.500,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.013.500,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	28.416.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	477.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	285.000,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	215.500,00
5.1.02.01.04.0493	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	421.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	606.378.186,00
5.1.02.01.04.0547	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	92.226.195,00
5.1.02.01.04.0576	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.700.000.000,00
5.1.02.01.04.0586	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	510.977.023,00
5.1.02.01.04.0599	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.443.511.400,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	400.000.000,00
5.1.02.01.04.0647	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0666	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	48.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	176.802.583.487,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	121.978.722.830,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.642.623.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	344.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.500.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.341.552.012,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	323.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.253.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.336.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.461.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.489.732.510,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.110.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.486.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	841.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	199.500.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	3.149.625.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	302.804.300,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.916.775.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	61.140.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	72.880.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	260.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	664.571.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	228.170.960,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	853.062.115,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.209.150.173,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	997.532.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.936.054.260,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	48.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	765.350.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.261.124.144,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	43.005.816.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	437.169.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	414.720.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	2.899.418.544,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	843.114.575,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	12.000.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	831.114.575,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.456.698.938,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	48.625.500,00
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	2.600.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.190.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.885.108.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	87.100.000,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	12.117.938,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	271.967.500,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.141.990.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.378.743.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	62.448.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	945.765.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	642.300.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	688.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	39.930.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	194.250.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	194.250.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	489.500.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	489.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.430.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	200.430.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.396.687.160,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.266.764.160,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	500.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.086.986.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.644.875.600,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.500.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	505.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.444.470.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.900.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	858.760,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	33.673.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.923.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.923.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.110.000.000,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	250.000.000,00
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	360.000.000,00
5.1.02.03.04.0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.117.157.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.117.157.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.396.467.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.720.690.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.198.950.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.007.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.007.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	191.950.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	191.950.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.365.230.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.365.230.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.365.230.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.506.531.481,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.506.531.481,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.506.531.481,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.219.320.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.077.320.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.815.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.815.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	525.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	525.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.237.320.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.237.320.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.500.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.500.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.142.000.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.142.000.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.142.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.900.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.650.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.650.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.650.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.250.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.250.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.250.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	194.907.108.213,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.097.947.026,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	48.482.070,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	48.482.070,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	48.482.070,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	836.640.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	836.640.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.640.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	810.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	45.527.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	45.527.500,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	26.087.500,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	19.440.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	37.436.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	37.436.500,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	37.436.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.879.948.748,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.844.841.973,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.844.841.973,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.685.186.275,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.848.047.500,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	969.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	34.624.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	507.766.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.199.218.150,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	94.561.125,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.349.920.500,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	473.608.500,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	13.165.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	395.095.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	54.693.500,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.698.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	400.660.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	157.001.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	107.294.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.495.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	82.811.500,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.988.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	49.707.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	49.707.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.562.760.968,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.562.760.968,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.948.765.395,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	124.679.114,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	136.603.881,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	166.172.656,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	13.631.143,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	10.542.200,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	31.710.500,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	130.656.079,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.770.000,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.770.000,00
5.2.02.08.02.0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	1.770.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.253.495.340,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.580.516.425,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.285.541.425,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	294.975.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.672.978.915,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	12.640.500,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	90.683.040,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	828.322.125,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	58.691.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.682.642.250,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	64.132.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	64.132.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	64.132.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	145.617.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	145.617.500,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	77.307.500,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	68.310.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.154.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.154.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	12.154.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.800.000.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.800.000.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.800.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.252.980.900,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.252.980.900,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.252.980.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.944.335.657,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.242.367.657,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.892.367.657,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.187.115.600,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	33.821.494.100,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.233.381.050,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	650.376.907,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	350.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	350.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	651.968.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	651.968.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	651.968.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.050.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.050.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.050.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.246.555.030,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.404.794.180,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.804.794.180,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	47.775.677.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	4.029.117.180,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	600.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	600.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	614.260.850,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	363.647.750,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	363.647.750,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	150.613.100,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	150.613.100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	16.227.500.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	16.227.500.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	16.227.500.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.618.270.500,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.536.977.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.536.977.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.111.846.900,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	493.056.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	22.420.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	34.485.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	528.350.400,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	102.508.800,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	244.310.400,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	116.923.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	116.923.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	116.923.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.964.370.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.964.370.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.964.370.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.733.754.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.500.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	391.233.754.900,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	391.233.754.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	391.233.754.900,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	298.743.368.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	92.490.386.900,00
	Jumlah Belanja	1.915.509.869.808,00
	Total Surplus/(Defisit)	-84.231.661.790,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.231.661.790,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.231.661.790,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	84.231.661.790,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	84.231.661.790,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	84.231.661.790,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	84.231.661.790,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION